



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Jamin Keterbukaan Informasi APBD DKI

Keterbukaan informasi APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 83,78 triliun mesti dijamin supaya pemenuhan belanja sesuai kebutuhan. Dengan demikian, tidak muncul program mubazir.

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta tahun 2023 disepakati Rp 83,78 triliun. Warga mesti tahu penggunaannya melalui keterbukaan informasi supaya konsisten antara program dan belanja komponen.

Anggaran Rp 83,78 triliun itu naik Rp 1,2 triliun dari penandatanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara 2023. Kenaikan terjadi lantaran ada proyeksi peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun.

APBD DKI 2023 terdiri dari pendapatan daerah Rp 74,38 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp 9,40 triliun. Alokasinya untuk belanja daerah Rp 74,61 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 9,16 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi C Brata dalam keterangan tertulis, Selasa (29/11/2022), menyebutkan, APBD fokus pada tiga program prioritas dengan alokasi 41,27 persen melalui belanja dan penyertaan modal daerah. Ketiga program prioritas itu ialah pengendalian banjir, penanganan kemacetan, danantisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian alokasi terhadap belanja pendidikan sebesar 21,09 persen dan alokasi terhadap standar pelayanan mi-

nimal kesehatan 13,47 persen. APBD 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, yaitu layanan dasar perkotaan, keuangan, ekonomi untuk mempertahankan keberhasilan pertumbuhan ekonomi Jakarta, serta pemberian bantuan sosial dan pelayanan publik.

Peneliti senior di Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan, penetapan APBD DKI Jakarta 2023 tepat waktu setelah sebelumnya kerap telat. Akan tetapi, mesti diperhatikan proporsi pemenuhan belanja sesuai skala prioritas untuk layanan dasar dan urusan wajib non-pelayanan dasar sehingga kegiatan berjalan sesuai kebutuhan.

"Pak Pj Gubernur sebaiknya membuka akses informasi APBD. Dua tahun terakhir warga sulit mengakses informasinya sehingga banyak kegiatan yang tidak diketahui warga," kata Roy, Selasa sore.

Salah satunya pembangunan sumur resapan secara masif. Hasilnya di lapangan banyak sumur tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Roy mengingatkan pentingnya pemberdayaan warga selain sarana dan prasarana. Hal itu bertolak dari jumlah silpa 2022.

"Banyak silpa menimbulkan pertanyaan, anggaran ini dikelola dengan baik untuk berdayakan masyarakat atau tidak. Jangan hanya poles infrastruktur," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan me-

nuturkan, besaran APBD sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun, jangan dulu terkecoh karena anggaran harus dikontrol, mulai dari rincian hingga komponen, karena kerap ditemukan inkonsistensi antara program dan belanjanya.

"Beberapa program dikembangkan untuk pengendalian banjir juga ada yang tidak efektif, misalnya pembuatan sumur biopori," katanya.

Proyeksi adanya penambahan silpa pada tahun depan menunjukkan ada program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak berjalan baik. Misbah menyarankan, pemanfaatan silpa jangan untuk dana hibah. Penting menyusun program yang dibutuhkan warga, seperti menambah anggaran perlindungan sosial.

"Perlu juga evaluasi pola penyertaan modal ke badan usaha milik daerah. Penyertaan modal selama ini berjalan efektif atau tidak," ucapnya.

Ketuk palu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kemarin di Gedung DPRD DKI Jakarta menjelaskan, dalam Rapat Paripurna, RAPBD DKI Jakarta 2023 diketuk dan disahkan. "Jadi, APBD DKI Jakarta 2023 Rp 83,7 triliun," katanya.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sesuai rapat paripurna memastikan besaran APBD DKI 2023 tersebut.

Michael Rolandi menam-

bahkan, untuk kegiatan prioritas pengendalian banjir, anggaran yang dialokasikan Rp 10 triliun. Anggaran itu, antara lain, untuk pembangunan infrastruktur program antisipasi banjir, seperti pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, pengadaan pompa dan pintu air. Ada juga kegiatan operasional dan pascabencana berupa perawatan pompa banjir, saluran drainase, dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Untuk kegiatan prioritas dalam penanganan kemacetan, anggaran yang dialokasikan Rp 14 triliun. Anggaran itu, antara lain, untuk pembangunan infrastruktur pengurai kemacetan, seperti proyek moda raya terpadu (MRT) dan kereta ringan (LRT). Kemudian, untuk penyaluran subsidi operasional Transjakarta, MRT, LRT, pelayanan angkutan bus sekolah, dan lain-lain.

Adapun untuk kegiatan prioritas dalam mengantisipasi dampak resesi ekonomi, anggaran yang dialokasikan Rp 10 triliun. Anggaran itu, antara lain, untuk penyaluran pangan murah (subsidi pangan), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Ada pula Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, dan pariwisata. (DAN/HLN)